



Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah Rp 1,2 Miliar di Desa Rejasa Tabanan

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta melaksanakan persembahyangan terkait pelaksanaan *Karya Ngenteg Linggih* Pura Luhur Batu Belig, Desa Rejasa Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Rabu (27/2). Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah sebesar Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD Badung tahun 2019, untuk perbaikan Pura Luhur Batu Belig dan Pura Luhur Gunung Kereban, yang keduanya berada di wilayah Desa Rejasa. Kehadiran Bupati Giri Pras-

ta yang didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat Desa Rejasa turut hadir, di antaranya *Panglingsir* Puri Oka Biaung I G.N. Oka Sudarsana, *panglingsir* Puri Oka Jegu I G.N. Gunawan, Perbekel Rejasa I Nyoman Wiastra, serta para Pemangku se-Desa Pakraman Rejasa.

Ketua Panitia Karya Made Suparta dalam sambutannya mengatakan, masyarakat

Rejasa sangat mengharapkan kehadiran Bupati Badung. Terlebih dengan bantuan dana hibah yang telah diberikan, sangat meringankan beban masyarakat. "Ibarat ada hujan, selama ini kami kekeringan. Bantuan dari Bapak Bupati Badung sebagian juga kami pergunakan untuk perbaikan jalan menuju Pura Batu Belig," kata Suparta seraya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan pihaknya sudah berkomitmen melaksanakan

visi Badung Angelus Buana yang artinya Badung berbagi, dari Badung untuk Bali. Dirinya menyadari, sebagai orang Bali masyarakat banyak menghabiskan waktu di adat dan banyak dikeluarkan untuk melaksanakan upacara yadnya sehari-hari. Kalau sekarang dibebani lagi untuk pembangunan, tentu akan sangat memberatkan. Untuk itulah Kabupaten Badung yang diberikan pendapatan daerah di atas rata-rata, berbagi dengan masyarakat di kabupaten lain, dengan tujuan dapat meringankan beban masyarakat.

Bupati Giri Prasta menyatakan salut dengan semangat dan persatuan *krama* Desa Pakraman Rejasa dalam melaksanakan *yadnya*. "*Yadnya* yang paling tinggi adalah ketika kita bermanfaat bagi orang lain," kata Giri Prasta.

Sebelum mengucurkan bantuan ke Desa Rejasa, Giri Prasta mengaku telah mendapatkan izin dari Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Pada akhir kegiatan Bupati Giri Prasta bersama *krama* Desa Pakraman Rejasa melakukan persembahyangan bersama di Pura Luhur Batu Belig. (ad1009)

Edisi : Jmat, 1 - 3 - 2019

Hal : 3



Anggaran Bedah Rumah Naik 50%

● Kesepakatan DPRD dengan Eksekutif Karangasem

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Anggaran bedah rumah 2019 naik hampir 50 persen jelang pemilihan legislatif (pileg). Naiknya anggaran bedah rumah adalah kesepakatan DPRD Karangasem dengan Eksekutif Karangasem saat pembahasan RAPBD 2019.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Karangasem, I Made Suama, mengatakan bedah rumah tahun ini bertambah sekitar 491 unit, dari 558 di tahun 2018 menjadi 1.049 unit di tahun 2019 yang tersebar di delapan kecamatan.

"1.049 unit diambilkan dari APBD Induk 2019. Nominalnya tinggal dikali Rp 30 juta per unit. Berarti anggarannya sekitar Rp 31 miliar lebih," kata Suama, Kamis (28/2). Anggaran itu naik melebihi usulan dari Rp 16,7 miliar menjadi Rp 31 miliar.

Mantan Kabag Humas Pemkab Karangasem itu mengungkapkan, meningkatnya anggaran bedah rumah karena kebutuhan warga dan menjelang pileg. Tujuannya untuk mengentaskan rumah tak layak huni di Bumi Lahar yang jumlahnya ribuan unit.

"Untuk bedah rumah dari provinsi, wewenang Dinas Sosial (Dinsos). Sedangkan dari kementerian jumlah bantuannya belum turun. Untuk pusat, nominalnya lebih kecil, Rp 15 juta per unit. Tahun sekarang kita usulkan ke pusat sekitar 6.000 unit," imbuh Suama.

Saat ini petugas dari Dinas Perkim sedang melakukan sosialisasi terkait program bedah rumah. Kemungkinan bedah rumah dilaksanakan mulai awal Maret 2019. Petugas juga telah mengecek, serta mensurvei penerima program bedah rumah.

Saat ini sisa rumah tak layak huni di Karangasem sekitar 5.000 unit lebih yang tersebar di delapan kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Kubu, Bebandem, dan Abang. Pihaknya berharap program ini bisa segera dituntaskan.

Suama berjanji akan terus menuntaskan rumah tidak layak huni di Karangasem melalui APBD Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan CSR. Penuntasan dilakukan secara bertahap sehingga tidak ada lagi rumah tak layak huni dan masyarakat merasa nyaman. (ful)

Edisi : Jumat, 1, Mar, 2019

Hal : 4



RADAR BALI

Bupati Sembahyang dan Bagi Hibah

MANGUPURA – Seiring *Karya Ngenteg Linggih Pura* Luhur Batu Belig, Desa Rejasa, Penebal, Tabanan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, turut sembahyang, Rabu (27/2).

Selain itu, Giri Prasta juga menyerahkan bantuan dana hibah Rp 1,2 miliar. Ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung 2019. Yakni, untuk perbaikan Pura Luhur Batu Belig dan Pura Luhur Gunung Kereban.

Ketua panitia karya, Made Suparta, mengatakan, masyarakat Rejasa sangat mengharapkan kehadiran Bupati Badung. Terlebih, dengan bantuan dana hibah ini, sangat meringankan beban masyarakat. "Ibarat ada hujan, selama ini kami kekeringan. Bantuan dari Bapak Bupati Badung sebagian juga kami pergunakan untuk perbaikan jalan menuju Pura

Batu Belig," kata Suparta, seraya berterima kasih kepada Bupati Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta mengatakan, sudah berkomitmen melaksanakan visi; *Badung Angelus Buana; Badung Berbagi, dari Badung untuk Bali*. Dia menyadari, sebagai orang Bali, masyarakat banyak menghabiskan waktu di adat dan banyak dikeluarkan untuk melaksanakan upacara *yadnya* sehari-hari. Kalau sekarang dibebani lagi untuk pembangunan, tentu akan sangat memberatkan.

Untuk itulah, paparnya, Kabupaten Badung yang diberikan pendapatan daerah yang di atas rata-rata, berbagi dengan masyarakat di kabupaten lainnya. Dengan tujuan, dapat meringankan beban. Bupati Giri Prasta menyatakan, salut dengan semangat dan persatuan *krama* Desa Pekraman

Rejasa dalam melaksanakan *yadnya*. "Yadnya yang paling tinggi adalah ketika Kita bermanfaat bagi orang lain," kata Giri Prasta. Menurutnya, sebe-

lum mengucurkan bantuan ke Desa Rejasa, telah mendapatkan izin dari Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Pada akhir kegiatan Bupa-

ti Giri Prasta bersama *krama* Desa Pekraman Rejasa melakukan persembahyangan bersama di Pura Luhur Batu Belig. (advertorial/dwi/djo)

Edisi : Jumat, 1, Mar, 2019

Hal : 10



RADAR BALI

Dua Penunggak Mau Membayar

Pemasangan Baliho Penunggak Dinilai Efektif

MANGUPURA - Badan Pendapatan (Bapenda) atau Pasedahan Agung Badung telah memasang baliho terhadap dua wajib pajak (WP) ▀ *Baca Dua Penunggak... Hal 11*

PARA PENUNGGAK PAJAK DI BADUNG

- Restoran Passargad dan Lalu Village, di wilayah Seminyak, Kuta, Badung.
- Restoran Passargad menunggak pajak Rp 1 miliar, Lalu Village menunggak pajak sebesar Rp 2,3 miliar dari bulan Januari 2002 hingga Februari 2019.
- Penunggak pajak dinilai melanggar Perbup 15 Tahun 2018 dan Instruksi Bupati Nomor 3 tahun 2018.
- Setelah dipasang baliho mereka mau membayar pajak dengan cara mencicil.



GRAFIS : GT DEWANTARA / RADAR BALI

Yang Membangkang Ditindak Paksa

■ DUA PENUNGGAK...

Sambungan dari hal 1

Mereka yang diperingatkan itu adalah Restoran Passargad dan Lalu Village di wilayah Seminyak, Kuta, Badung.

Karena belum melunasi pajaknya, pemasangan baliho tersebut membuat luluh WP tersebut dan membayar tunggakan pajak secara mencicil.

Kepala Bapenda Badung Made Utama mengatakan bahwa dua wajib pajak tersebut sebelumnya sengaja disita dan dipasang baliho wajib pajak. Hal ini dikarenakan mereka ti-

dak pernah melakukan pembayaran pajak hingga nominalnya mencapai miliaran rupiah.

Baliho itu bertuliskan tulisan *Objek Pajak Ini Menunggak Pajak Daerah, Bila Dalam Jangka Waktu 14 Hari Kerja Tidak Melunasi Tunggakan Pajak Akan Dilakukan Penagihan Secara Paksa.* "Tulisan itu dipasang di depan restoran dan vila penunggak pajak. "Kami sebenarnya tidak menginginkan penindakan tegas. Tapi, kalau sudah membangkang apa boleh buat, terpaksa kami tindak," terang Utama, kemarin (1/3).

Setelah dipasang baliho, dua

WP tersebut mau mencicil pembayaran tunggakan pajak. Sehingga pihaknya langsung membuka spanduk tersebut. "Mereka sudah sudah membayar, walaupun secara mencicil. Jadi, kami tetap memberi mereka izin beroperasi dan mencicil pelunasan pajaknya," tuturnya.

Penindakan tersebut diakui sudah sesuai Perbup 15 Tahun 2018 dan Instuksi Bupati Nomor 3 Tahun 2018. Seperti diketahui Restoran Passargad menunggak pajak hingga Rp 1 miliar. Sedangkan Lalu Village menunggak pajak sebesar Rp 2,3 miliar dari bulan Januari

2002 hingga Februari 2019.

Terkait jumlah wajib pajak yang menunggak di Kabupaten Badung, pihaknya mengaku sudah semua melakukan pembayaran pajak. Namun, tetap mengecek ke lapangan dan melakukan pembinaan terkait dengan wajib pajak yang menunggak atau membangkang alias tidak membayar pajak. "Tim kami terus ke lapangan, kalau ada yang menunggak atau tidak mau membayar kami berikan pembinaan dulu. Jika membangkang, baru kami lakukan tindak paksa," pungkasnya. (dwi/pit)

Edisi : Sabtu 2 Maret 2019
Hal : 1



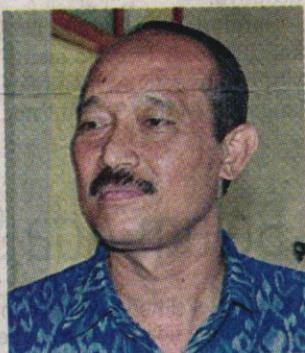
Rp 675 M untuk 43 Desa

- BPD Diminta Ikut Melakukan Pengawasan
- Dana Desa Cair Jika Ada Laporan Bulanan

MANGUPURA, TRIBUN BALI

Sebelum 43 desa yang ada di Kabupaten Badung menyertakan laporan bulanan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan, dana desa yang besarnya Rp 675 miliar lebih itu tidak bisa cair.

Dana desa itu meliputi penyisihan 10 persen pajak daerah sebesar Rp 561.188.431.928, penyisihan 10 persen retribusi daerah sebesar Rp 16.781.015.257, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 44.660.525.600 dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



ISTIMEWA

PUTU GEĐE SRIDANA

sebesar Rp 52.584.767.000.

Selain melakukan pencairan dana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) Badung bersama tim juga melakukan pengawasan dan verifikasi terkait kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Putu Geđe Sridana, Jumat (1/3) mengatakan dana desa berasal dari beberapa sumber. Masing-masing sumber memiliki pola pengawasan. Ia mencontohkan seperti halnya dana desa yang bersumber dari APBN mulai dari perencanaan ada pola, persentase, dan lain sebagainya. Semuanya sudah memiliki petunjuk dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

Setelah itu dalam pelaksanaannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi penuh dan harus ada laporan tiap bulan. "Kalau belum ada laporan, tahap selanjutnya tidak dicairkan. Itu untuk dana desa dari pusat. Pembagiannya tiga kali dalam setahun," jelas Sridana.

Menurutnya, kalau di luar dana desa yakni dari bagi hasil pajak, retribusi daerah, dan lainnya, itu melalui mekanisme verifikasi tim gabungan Pemkab Badung. Kemudian disesuaikan dengan mekanisme program yang dibuat

desa. "Dalam pelaksanaannya kami membina tiap bulannya, penggunaan harus sesuai dengan perencanaannya," ungkapnya.

Pencairannya sesuai target realisasi pajak dan retribusi daerah, yakni setiap realiasi bulanan, sebanyak 10 persen langsung dibagi untuk desa. Terakhir, ditutup tahun anggaran, desa membuat laporan secara keseluruhan. Jika semua itu belum ada laporan pertanggungjawaban setiap bulannya, dana untuk desa ini juga tidak bisa dicairkan.

"Nanti pengawasan berikuk dari instansi pengawas dalam hal ini Inspektorat

Badung baik pengawasan insendentil maupun secara sample," jelasnya.

Sementara dari 43 desa, Desa Pelaga mendapatkan alokasi dana terbesar mencapai Rp 21,7 miliar lebih. Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara juga mendapatkan dana yang besar yaitu Rp 21,5 miliar lebih, sedangkan untuk alokasi dana terkecil diterima Desa Kuwum sebesar Rp 11,7 miliar lebih. Pembagian dana ini juga ada indikator yang dipakai Pemkab Badung.

"Pembagian ada formulasinya. Pertama dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah banjar dan

desa adat, dan jumlah orang miskin. Desa Pelaga wilayahnya luas, desa adat banyak, dan orang miskin masih tinggi. Itu indikator. Perhitungan terbuka karena totalnya harus seimbang sesuai diserahkan ke APBD," terangnya.

Walaupun pihaknya telah melakukan pengawasan tentu tidak bisa menyurutinya setiap hari sehingga peran BPD di masing-masing desa juga sangat diperlukan untuk mengawasi. Begitu juga peran serta masyarakat juga diperlukan untuk saling mengawasi. Sehingga tidak ada penyalahgunaan dana desa. (gus)

Edisi : Sabtu 2 Maret 2019

Hal : 6



E-Retribusi Mulai Diberlakukan, Bupati Suwirta Pantau Petugas Pemungutan

KEBIJAKAN E-Retribusi mulai resmi diberlakukan, Jumat (1/3) kemarin. Guna memastikan prosesnya berjalan lancar, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta melakukan pemantauan langsung proses pemungutannya oleh petugas di Pasar Umum Galiran. Dengan penerapan E-Retribusi ini, diharapkan tidak lagi terjadi kebocoran pendapatan.

Kebijakan E-Retribusi ini lahir dari kerja sama pemerintah daerah dengan Bank Mandiri. Dalam penerapannya, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa mengatakan ada sepuluh petugas yang melakukan proses pemungutan dan disediakan

sepuluh mesin gesek. Per blok disiapkan dua petugas. Sementara petugas melakukan proses pungutan setiap hari sebesar Rp 5 ribu, untuk sekaligus membiasakan petugas pungut dengan kebijakan baru ini. Nantinya pada bulan depan, baru proses pungutan akan dilakukan sebulan sekali.

Dalam penerapannya, para pedagang mendapatkan kartu ATM dan menabung seperti biasanya. Nanti secara otomatis mereka akan membayar retribusi melalui tabungan tersebut. Guna mempermudah pungutan, pihak Bank Mandiri bekerja sama dengan koperasi sebagai lembaga keuangan yang paling dekat dengan pedagang di Pasar Galiran. E-Retribusi memi-

liki beberapa manfaat, yakni untuk meningkatkan efisien waktu dan meminimalisir kesalahan pencatatan data, serta dapat meminimalisir kesalahan transaksi pembayaran ketika melakukan pembayaran retribusi pasar. "Pemungutan E-Retribusi kepada para pedagang hari ini sudah mulai dilakukan. Bulan depan baru akan dilakukan setiap sebulan sekali," ujarnya.

Selain bekerja sama dengan Bank Mandiri, ke depan akan dilaksanakan kerja sama dengan koperasi guna mempercepat proses pembayaran pedagang. "Petugas bank nantinya harus ikut membina dan memberikan pendampingan agar aplikasi ini bisa berjalan dengan sebaik-

baiknya," harapnya.

Sementara pengguna sistem E-Retribusi digunakan oleh para pedagang tetap yang memiliki kios/los yang berada di Pasar Umum Galiran. Ke depannya, sistem E-Retribusi akan diterapkan untuk pedagang musiman/lancuban yang melakukan transaksi perdagangan di Pasar Umum Galiran. "Melalui E-Retribusi, proses transaksi di Pasar Umum Galiran bisa menjadi lebih cepat, untuk menghindari kebocoran, optimalisasi pendapatan pasar dan mengajarkan para pedagang membiasakan diri menggunakan transaksi elektronik di tengah perkembangan teknologi informasi (TI).

Dengan sistem ini, diharapkan segala hal dapat diefisiensi. Karena retribusi yang dilakukan secara manual, membutuhkan SDM, ketelitian, dan rawan *human error* sehingga rentan terjadi kebocoran retribusi. Sementara jika sudah menggunakan e-retribusi semua sudah tersistem dan masuk ke kas daerah dengan akurat. Tenaga yang ada, nanti akan dimaksimalkan untuk mengedukasi pedagang.

Jumlah seluruh pedagang yang wajib retribusi di Pasar Umum Galiran 1.744 pedagang. Terkait penerapannya ke pedagang lancuban/musiman, Wayan Ardiasa mengatakan akan melakukan pendataan dan memberi para pedagang sejenis *id card*. Selain untuk memaksimalkan penerapan e-retribusi, ini juga untuk mempermudah pengawasan bagi para pedagang. (ad034)



E-RETRIBUSI - Bupati Suwirta saat turun langsung ke Pasar Umum Galiran menjelaskan langsung tujuan diterapkannya E-Retribusi ini.



Desa Diminta Alokasikan Anggaran Tangani "Stunting"

Gianyar (Bali Post) -

Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gianyar meminta 64 desa di Gianyar agar mengalokasikan anggaran untuk menangani kasus *stunting* atau masalah gizi pada anak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Gianyar Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan hal itu, Jumat (1/3) kemarin.

Adi mengatakan, tahun 2019 ini dana desa yang turun di Gianyar sekitar Rp 350 miliar lebih. Seluruh dana tersebut dibagi ke 64 desa, sehingga setiap desa mengelola dana Rp 5,5 miliar lebih. "Kalau sampai di desa tidak dianggarkan untuk penanganan *stunting*, itu keliru. Sebab, intruksi Menteri Desa sudah jelas. Dana desa tersebut bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya *stunting*," jelasnya.

Dari dana Rp 5,5 miliar lebih per desa itu, kata Adi, 30 persen digunakan untuk operasional kantor desa, dan 70 persen untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ia mengaku sudah menyampaikan ke masing-masing desa agar dianggarkan khusus pada posyandu untuk menangani *stunting* ini. Besaran anggarannya tentu berbeda per desa. Tergantung jumlah posyandu di setiap desa. "Seperti di Desa Bresa, hanya ada tiga posyandu kira-



Bali Post/kmb35

Dewa Ngakan Ngurah Adi

kira dananya Rp 20 juta. Berbeda dengan Desa Batubulan ada sekitar 20 posyandu, itu bisa anggarannya sekitar Rp 120 juta," ujarnya.

Adi menambahkan, upaya penanganan *stunting* sudah dilakukan dengan merekrut tenaga pendamping posyandu. Dikatakan, para petugas ini memiliki latar belakang ilmu kesehatan. "Sekarang mereka sedang bergerak melakukan pendataan, terkait berapa sebenarnya yang kena *stunting*, siapa dan di mana. Setelah mendapat data, kami akan segera bergerak dengan memprioritaskan posyandu yang tercatat ada *stunting*," ujarnya.

Adi mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat untuk menangani kasus *stunting*. "Keluarga yang harus dikuatkan, sehingga otomatis di keluarga, kalau ada kena *stunting* artinya masih lemah," ujarnya. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 2, Mar, 2019

Hal : 9



Desa Harus Laporkan Kegiatan Secara Berkala

★ Rp 675 Miliar untuk 46 Desa di Kabupaten Badung

MANGUPURA, NusaBali

Dana desa untuk 46 desa se-Kabupaten Badung telah dialokasikan. Ada empat sumber penerimaan, yakni penyisihan 10 persen pajak daerah, penyisihan 10 persen retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana dari pusat.

Totalnya mencapai Rp 675.214.739.785 (Rp 675 miliar lebih). Dalam penggunaan anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung mewanti-wanti agar perangkat desa menyetorkan laporan kegiatan secara berkala, sebab ini terkait dengan pencairan dana.

"SPj (Surat Pertanggungjawaban, red) terhadap kegiatan harus dilaporkan. Kalau tidak, anggaran tidak akan cair. Begitu juga dengan dana desa dari pusat yang dicairkan tiga termin dalam setahun. Kalau dana yang dicairkan pada termin pertama laporan pertanggungjawabannya belum selesai, maka tidak akan cair dana desa



● NUSABALI/ARI SISWANTO

Kepala Dinas PMD,
Putu Gede Sridana

termin berikutnya. Dana desa dari pusat baru cair 40 persen," kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, Jumat (1/3) kemarin.

Upaya mengawasi penggunaan anggaran di desa, tegas Sridana, melibat-

kan stakeholder terkait. Meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, dan aparat terkait lainnya. "Khusus di internal, kami ada tim juga yang melakukan pembinaan tiap bulan," terang birokrat asal Denpasar itu.

"Jadi, begini anggaran total Rp 675 miliar lebih itu kan belum dicairkan. Menunggu realisasi kegiatan yang ada di desa. Penyerahan simbolis kemarin hanya menyampaikan total alokasi anggaran per desa. Untuk bisa cair, desa harus melakukan secara berkala, baru anggaran bisa cair," tegas Sridana.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dalam beberapa kesempatan berpesan supaya desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukan. Perbekel juga diminta menggunakan prinsip-prinsip anggaran yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami akui ini

menjadi beban tersendiri bagi perbekel dalam mengelola dana besar. Pertanggungjawaban cukup berat. Untuk itu BPD dan perbekel agar bersinergi, agar alur pemanfaatan dana ini baik secara aturan, penyiapan administrasi dan tata pelaksanaannya di masyarakat tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku," pesannya.

Selain itu kepada perangkat daerah juga diminta ikut bersama-sama memberikan pendampingan. "Kita menginginkan sejak awal pemerintah desa ada yang memberikan arahan yang pasti, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari," kata Wabup Suiasa.

Sekadar mengingatkan, di Kabupaten Badung, penerima terbesar Dana Desa adalah Desa Pelaga, Kecamatan Petang dengan nilai Rp 21.758.529.825. Sedangkan, desa yang memperoleh Dana Desa terkecil diperoleh Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, senilai Rp 11.713.246.302. **asa**

Edisi : Sabtu, 2, Mar, 2019

Hal : 2



Bendungan Sidan Mulai Digarap

★ Nilai Proyek Rp 786 Miliar, Dibangun di Perbatasan Badung, Bangli, Gianyar

Bendungan Sidan dibangun hampir bersamaan dengan proyek Bendungan Tamblang di kawasan Buleleng Timur

MANGUPURA, NusaBali
Satu lagi proyek bendungan yang segera digarap di Bali. Selain Bendungan Tamblang di Buleleng Timur, juga ada Bendungan Sidan yang dibangun di perbatasan tiga kabupaten: Badung, Bangli, dan Gianyar.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Pembuatan akses jalan menuju Bendungan Sidan di Banjar Selantang, Desa Bilok Sidan.



Desain Bendungan Sidan yang dibangun di atas lahan seluas 82,73 hektare di perbatasan Badung, Bangli, dan Gianyar

Edisi : Sabtu, 2 Maret 2019

Hal : 1



Sambungan... 1

Bendungan Sidan Mulai Digarap

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Proyek fisik Bendungan Sidan yang bernilai Rp 786,32 miliar bahkan sudah mulai dikerjakan dan ditarget selesai tahun 2021 mendatang.

Pembangunan Bendungan Sidan, yang merupakan proyek pusat dengan didanai APBN, dibangun di atas lahan seluas mencapai 82,73 hektare yang berlokasi di lima desa bertetangga dari tiga kabupaten berbeda. Pertama, wilayah Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Kedua, wilayah Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Gianyar. Ketiga, kawasan Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Keempat, kawasan Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Kelima, kawasan Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Lahan terluas yang dibebaskan berada di tiga desa kawasan Kecamatan Kintamani, Bangli dengan luas total mencapai 30,43 hektare. Sedangkan luas lahan yang digunakan di kawasan Desa Bilok Sidan, Kecamatan Petang mencapai 27,06 hektare. Lahan ini tersebar di tiga banjar, masing-masing Banjar Bilok, Banjar Sidan, dan Banjar Selantang. Sementara luas lahan bendungan di Buah Kaja, Kecamatan Payangan mencapai 25,24 hektare.

Bangunan fisik Bendungan Sidan berikut fasilitas pendukungnya dirancang dengan luas sekitar 42,36 hektare. Tinggi bangunan Bendungan Sidan mencapai sekitar 68 meter. Nantinya, Bendungan Sidan diperkirakan mampu menampung air dengan volume 3,8 juta meter kubik.

Pembangunan fisik Bendungan Sidan sudah dimulai sejak November 2018 lalu, diawali dengan membuat akses jalan masuk. Proyek bendungan senilai Rp 786,32 miliar ini dikerjakan oleh dua perusahaan, yakni PT Brantas Abipraya dan PT Universal Suryaprima.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Airlangga Mardjono, menyatakan proyek Bendungan Sidan sudah mulai digarap oleh pihak rekanan, terhitung sejak pandatangani kontrak, November 2018 lalu. Saat ini, kata Airlangga, pihak rekanan sedang membuat akses jalan masuk menuju lokasi proyek Bendungan Sidan ke arah tenggara dari Jembatan Tertinggi Tukad Bangkung.

Jalan masuk sepanjang 3 kilometer tersebut dibuat dari jalur Banjar Selantang, Desa Bilok Sidan. "Sekarang sedang dilakukan pembuatan jalan masuk menuju Bendungan Sidan. Akses jalan yang dibikin tersebut memiliki panjang sekitar 3 kilometer dengan lebar 7 meter," ujar Airlangga saat dikonfirmasi NusaBali per telepon, Kamis (28/2) lalu.

Bila pembuatan jalan sudah selesai, kata Airlangga, akan dilanjutkan dengan pengerjaan fisik Bendungan Sidan dan sarana penunjang lainnya. Luas tapak bendungan dirancang seluas 42,36 hektare dengan tinggi mencapai 68 meter. "Air yang dialirkan ke Bendungan Sidan bumber dari Sungai Ayung," tandas Airlangga.

Menurut Airlangga, proyek Bendungan Sidan ditargetkan sudah selesai dibangun tahun 2021 mendatang. Bendungan Sidan ini diproyeksikan mampu memasok air baku dengan debit sebesar 1.750 liter per detik ke wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Kota Denpasar.

Tak hanya memasok air baku, air Bendungan Sidan juga bisa mengairi sawah di sejumlah kabupaten. Selain itu, bendungan Sidan juga potensial dijadikan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Aor (PLTA), yang mampu menghasilkan listrik sebesar 1,1 MW. Manfaat lainnya, keberadaan Bendungan Sidan tentunya akan memperkuat sektor pariwisata.

Sementara itu, Camat Petang, Gede Eka Sudarwita,

mengatakan proyek Bendungan Sidan kini masuk tahap membebaskan lahan, terutama di tiga banjar kawasan Desa Bilok Sidan, yakni Banjar Selantang, Banjar Sidan, dan Banjar Bilok. "Penentuan harga ganti rugi lahan melibatkan tim appraisal (tim independen penaksir harga lahan, Red)," jelas Eka Sudarwita saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kamis siang.

Eka Sudarwita berharap dengan dibangunnya Bendungan Sidan, nantinya dapat mendukung kebijakan Pemkab Badung yang menjadikan wilayah Kecamatan Petang sebagai daerah konservasi, dengan prioritas pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh agrowisata. "Pembangunan Bendungan Sidan diharapkan dapat mencetak areal sawah baru, selain optimalisasi lahan sawah yang sudah ada, melalui peningkatan ketersediaan air untuk jaringan irigasinya," tegas Eka Sudarwita.

Selain itu, kata dia, dengan dibangunnya Bendungan Sidan, bisa menjadi stimulus pengembangan daya tarik wisata baru yang akan mampu tumbuh berkembang bersama-sama dengan objek wisata yang sudah ada, seperti Jembatan Tertinggi Tukad Bangkung (di Desa Pelaha, Kecamatan Petang) dan Air Terjun Nungnung (di Desa Pelaga, Kecamatan Petang).

Selain Bendungan Sidan, pada saat hampir bersamaan juga dibangun Bendungan Tamblang di wilayah Buleleng Timur. Proyek Bendungan Tambang senilai Rp 700 miliar yang ditarget rampung tahun 2022 ini, dibangun di atas lahan seluas 58,79 hektare di empat desa bertetangga kawasan Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan, Buleleng.

Keempat desa yang dijadikan areal Bendungan Tamblang tersebut, masing-masing Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan), Desa Bonthing (Kecamatan Kubutambah-

an), Desa Sawan (Kecamatan Sawan), dan Desa Bebetin (Kecamatan Sawan). Dari luas lahan bendungan mencapai 58,79 hektare yang dibebaskan itu, terbanyak berada di Desa Sawan, Kecamatan Sawan seluas 38,59 hektare. Menyusul kemudian di Desa Bila (Kecamatan Kubutambahan) seluas 12,2 hektare, di Desa Bonthing (Kecamatan Kubutambahan) seluas, 6,49 hektare, dan di Desa Bebetin (Kecamatan Sawan) seluas 1,49 hektare.

Bendungan Tamblang dengan luas genangan 358.585 meter persegi dan tinggi mencapai 68 meter ini diperkirakan mampu menampung air hingga 7 juta meter kubik. Air yang dialirkan ke Bendungan Tamblang bersumber dari Tukad Daya di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan. Bendungan Tamblang diproyeksikan untuk penyediaan air baku dengan debit 510 liter per detik. Di samping itu, Bendungan Tamblang juga akan menjadi objek wisata dan airnya sekaligus untuk mengairi persawahan di dua kecamatan wilayah Buleleng Timur.

Dengan dibangunnya Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang, maka di Bali nantinya akan ada tiga bendungan besar. Sebelumnya, di Bali sudah dibangun bendungan terbesar, yakni Bendungan Titab-Ularan yang berlokasi di 6 desa bertetangga dari 2 kecamatan kawasan Buleleng Barat. Rinciannya, 4 desa di wilayah Kecamatan Busungbiu yakni Desa Titab, Desa Kekeran, Desa Busungbiu, dan Desa Telaga. Sedangkan 2 desa lagi masuk wilayah Kecamatan Seririt, masing-masing Desa Ularan dan Desa Ringdikit.

Bendungan Titab-Ularan yang luasnya mencapai 64 hektare dengan kedalaman 60 meter, mampu menampung 12 juta meter kubik air. Proses pengisian air Bendungan Titab-Ularan sudah dimulai sejak 13 Desember 2015 lalu. **asa**

Edisi : Sabtu, 2 Maret

Hal : 15



RADAR BALI

Alokasi DD Klungkung Naik Rp 8 M Lebih

DD Masih Didominasi untuk Perbaikan Infrastruktur

SEMARAPURA- Total dana desa (DD) yang diberikan pemerintah pusat untuk desa-desa di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp 8 miliar lebih. Adapun jika di tahun 2018 lalu, Total DD yang diberikan sebesar Rp 43,2 miliar lebih. Tahun 2019 ini, total DD yang diberikan mencapai Rp 51,5 miliar lebih.

Peningkatan DD tersebut menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, IWayan Suteja beberapa waktu lalu, berlaku secara nasional. Peningkatan alokasi DD itu terjadi lantaran pagu nasional mengalami peningkatan. "Jadi untuk total dana desa yang diterima Klungkung mencapai Rp 8 miliar lebih," katanya.

Adapun untuk Kabupaten Klungkung, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida adalah desa yang paling besar mendapat alokasi DD, yakni Rp 1,9 miliar lebih. Besarnya DD yang diterima desa tersebut, lantaran cakupan wilayahnya yang cukup luas, kondisi

geografis yang sulit dijangkau, dan jumlah warga miskinnya cukup banyak.

"Ada tiga perhitungan dana desa, yaitu alokasi dasar yang dibagi rata seluruh Indonesia sama, alokasi afirmasi desa tertinggal dan sangat tertinggal da ini tidak ada di Klungkung. Kemudian alokasi formula berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) miskin, luas wilayah dan geografis," bebernyanya.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan dengan adanya peningkatan alokasi DD yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut tentunya desa-desa di Klungkung sangat diuntungkan karena

mendapat suntikan dana lebih. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa.

Sampai tahun 2019, menurutnya, perbaikan infrastruktur masih mendominasi pemanfaatan DD. Terutamanya di Nusa Penida yang memiliki wilayah yang lebih luas dengan kondisi jalan yang memang kurang baik. Sehingga hingga saat ini desa-desa di Nusa Penida masih memanfaatkan DD untuk perbaikan jalan. "Kalau di Nusa Penida itu DDnya lebih banyak untuk fisik terutamanya untuk rabat gang, jalan usaha tani," bebernyanya. (ayu/han)

Edisi : Minggu, 3 Maret 2019.

Hal : 5



Dana Desa di Tabanan Naik, Fokus ke Pemberdayaan Ekonomi

TABANAN, NusaBali

Dana desa tahun 2019 untuk Kabupaten Tabanan naik. Dari sebelumnya di 2018 hanya didapat Rp 101 miliar kini di 2019 diperoleh Rp 118 miliar. Saat ini pencairan tahap I telah masuk ke rekening daerah dan menunggu diamprah oleh desa. Dan sesuai arahan pemerintah pusat, dana desa disarankan fokus untuk pemberdayaan ekonomi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan Roemi Liestyowati didampingi Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa I Ketut Suarnata, mengatakan dana desa untuk tahun 2019 di Tabanan meningkat, dari Rp 101 miliar di 2018 kini menjadi Rp 118 miliar. "Pencairan dana desa tahap I sudah masuk ke rekening daerah, tinggal menunggu proses amprah dari desa," ungkapnya, Minggu (3/3).

Dikatakan besaran dana desa yang didapat setiap desa berbeda tergantung luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan letak geografis yang



Roemi Liestyowati

• NUSABALI/DESAK

sudah diatur oleh pusat. Di 2019 ini, desa yang mendapatkan dana desa terbanyak adalah Desa Pujungan, Kecamatan Pujuan mencapai Rp 1,6 miliar. Sedangkan desa yang mendapatkan dana desa paling kecil adalah Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan dengan jumlah Rp 750 juta.

Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa I Ketut Suarnata menambahkan, dana desa yang digelontorkan ke masing-masing desa sesuai arahan pusat harapannya tidak ke infrastruktur melainkan ke pemberdayaan dan peningkatan ekonomi

khususnya BUMDes. "Karena selama 4 tahun dana desa sudah diarahkan ke infrastruktur," tegas Suarnata.

Dia menegaskan, dalam pengelolaan dana desa diharapkan semua perbekel maupun Pj bisa dengan cermat mengelola dan sesuai aturan. Agar seluruh tingkatan di desa bisa seimbang dan membenahi apa yang kurang. "Pusat juga mengharapkan pengelolaan dana desa lebih ke kegiatan non fisik," tandasnya. **de**

Edisi : 4 Maret 2019

Hal : 7



Anggaran Dana Desa Meningkat Rp 17 Miliar

● 4 Tahun Proyek Fisik, Kini Saatnya Pemberdayaan

TABANAN, TRIBUN BALI - Dana Desa (DD) disarankan untuk fokus terhadap pemberdayaan ekonomi. Terlebih tahun ini dana desa untuk Kabupaten Tabanan meningkat. Pencairan tahap pertama telah masuk ke rekening daerah dan menunggu diampurah oleh desa.

"Pencairan dana desa tahap pertama sudah masuk ke rekening daerah, tinggal menunggu proses ampurah dari desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Roemi Liestyowati, Minggu (3/3).

Ia menambahkan, untuk tahun 2019, dana desa di Tabanan meningkat dari tahun sebelumnya. Dari Rp 110 miliar di tahun 2018 kini meningkat menjadi Rp 118 miliar. Artinya ada peningkatan Rp 17 miliar.

Roemi menjelaskan, besaran dana desa yang diperoleh setiap desa jumlahnya berbeda-beda. Sebab pembagian dana desa disesuaikan dengan luas wilayah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan letak geografis yang sudah diatur oleh pusat.

Di tahun 2019, desa yang mendapatkan jumlah dana desa terbanyak adalah Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan mencapai Rp 1,6 miliar. Sedangkan desa yang mendapatkan dana desa paling kecil adalah Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan dengan jumlah Rp 750 juta. "Jumlahnya berbeda-beda karena sudah ditentukan," ucapnya.

Dana desa yang digelontorkan ke masing-masing desa sesuai arahan pusat harap-

anya tidak ke infrastruktur melainkan ke pemberdayaan dan peningkatan ekonomi khususnya BUMDes. "Karena selama empat tahun dana desa sudah diarahkan ke infrastruktur," tegasnya.

Ia menegaskan, untuk seluruh perbeker termasuk pejabat yang baru ditunjuk agar mengelola anggaran sesuai dengan aturan. Sehingga jika sudah sesuai dengan aturan, pembangunan akan merata karena sudah seimbang sesuai tingkatannya.

"Artinya harus seimbang, mana yang kurang itu dilengkapi. Pengelolaan dana desa juga disarankan agar tidak ke infrastruktur melainkan ke kegiatan nonfisik lainnya seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya BUMDes," tandasnya. (mpa)

Edisi : Sewih, 4, Mar, 2019

Hal : 5



Blok A Rampung, Pedagang Segera Tempati Pasar Semarapura

Semarapura (Bali Post) -

Proses pembangunan Blok A Pasar Umum Semarapura akhirnya rampung. Para pedagang yang sebelumnya dipindah dari lokasi itu akan segera kembali menempati gedung baru tersebut. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta meminta seluruh fasilitas pendukung di sekitar pasar agar segera dilengkapi.

Penegasan itu disampaikan Bupati Suwirta ketika mengecek langsung gedung baru tersebut bersama Kepala UPT Pasar Klungkung Komang Widiyasa Putra, belum lama ini. Saat itu, Bupati mengecek seluruh sudut pasar tersebut. Mulai dari aspek kebersihan, pertamanan, toilet, sampai fasilitas pelayanan informasi bagi para pengunjung pasar.

Untuk di areal masuk pasar Blok A, Bupati Suwirta meminta agar segera dipasang rambu-rambu petunjuk untuk kendaraan bermotor dan di bagian dalam pasar, diisi dengan petunjuk arah untuk memudahkan pengunjung pasar memilih kebutuhannya. Sementara terkait dengan kebersihan di dalam dan di luar pasar, dirinya menegaskan agar tetap dijaga. Begitu juga dengan kerendangan pertamanan di areal Pasar Seni Blok A Semarapura.

Selain menekankan perlunya fasilitas tambahan, Bupati Suwirta juga melakukan peninjauan terhadap beberapa fasilitas pasar yang masih diperlukan ada penambahan-penambahan kecil untuk memberi

kesan modern dan kenyamanan bagi pengunjung. "Salah satunya perlu pengadaan eskalator, pengadaannya masih proses tender dan dipastikan rampung tahun ini," tegasnya.

Sementara kapan persisnya para pedagang akan dipindah, masih belum dipastikan. Tetapi, pihaknya memastikan proses perpindahan pedagang ini akan segera dilakukan. Bupati Suwirta ingin memastikan Pasar Seni di Blok A ini akan menjadi tempat belanja yang nyaman bagi pengunjung. Sebab, Blok A Pasar Semarapura merupakan pasar tradisional yang dibangun dengan konsep modern. Pengerjaan proyek gedung dengan anggaran bersumber dari APBD Klungkung sebesar Rp 10 miliar.

Pasar tersebut akan dilengkapi dengan eskalator serta *stage* yang nantinya difungsikan menjadi tempat pameran produk UMKM dan *fashion show*. Proyek ini sudah selesai tepat waktu. Sehingga pada April 2019 nanti sudah bisa di-*launching* dan dipergunakan untuk lokasi Festival Semarapura. (kmb31)

Edisi : Senin, 4, Mar, 2019

Hal : 12